

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALOKASIAN
DANA NON HALAL BAGI KEPENTINGAN SOSIAL PADA
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) MANFAAT
GAYUNG KEBONSARI SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

DARMIATI
C02208106



Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

**Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN

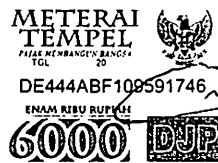
Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Darmiati
NIM : C02208106
Fakultas/Jurusan : Syariah/Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal bagi Kepentingan Sosial pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juli 2012

Saya yang menyetujui,



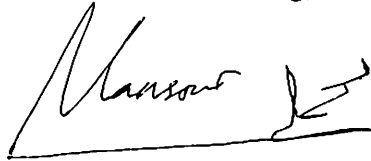
Darmiati
C02208106

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Darmiati NIM C02208106 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Juli 2012

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mansur', with a horizontal line underneath it.

Ahmad Mansur, BBA., M.E.I

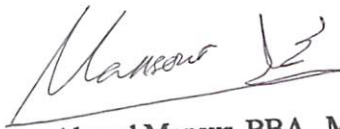
NIP. 197109242003121003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Darmiati NIM C02208106 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana starta satu dalam ilmu syariah.

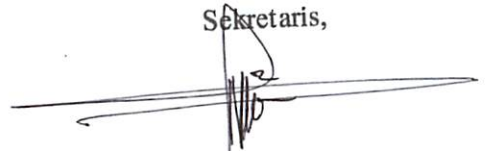
Majelis Munaqasah skripsi;

Ketua,



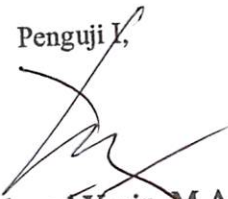
Ahmad Mansur, BBA., M.E.I
NIP. 197109242003121003

Sekretaris,



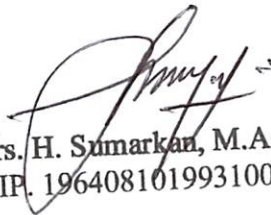
Sanuri, S.Ag., M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji I,



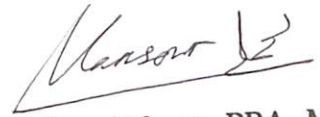
Drs. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji II,



Drs. H. Sumarkan, M.Ag.
NIP. 1964081019931002

Pembimbing,



Ahmad Mansur, BBA., M.E.I
NIP. 197109242003121003

Surabaya, Agustus 2012

Mengesahkan;

Dekan Fakultas Syariah,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal bagi Kepentingan Sosial pada Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pengalokasian dana non halal bagi kepentingan sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya serta mendeskripsikan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengalokasian dana non halal bagi kepentingan sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pola deduktif. Sedangkan data yang dihimpun berasal dari data tentang sumber dana non halal dan pengalokasiannya di KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya. Sumber data yang dipakai adalah wawancara, arsip, dan dokumen di KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya serta proses pengalokasian dananya.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa KJKS Manfaat menggunakan dana non halal yakni denda yang mana dana tersebut dialokasikan pada kepentingan umum, dan hal ini menyalahi prinsip perbankan syariah yang bebas riba. Namun apabila setiap barang haram tidak boleh dimanfaatkan, maka bagaimana dengan dana non halal hasil denda yang didapatkan dari nasabah yang lalai dalam pembayarannya. Tentunya dalam hal tersebut harus tetap bisa dimanfaatkan. Bila melihat dari sumbernya saja, yakni barang riba, maka dana yang didapat dari kerjasama tersebut akan sia-sia belaka tidak dapat disalurkan. Sehingga pendapat yang tidak membolehkan bisa dikesampingkan demi kemaslahatan umat.

Kebijakan yang diambil oleh KJKS Manfaat yaitu merupakan salah satu cara untuk memberikan kemaslahatan masyarakat di daerah Surabaya dan sekitarnya, maka pengalokasian dana non halal diperbolehkan, karena dalam Islam hal tersebut termasuk konsep *masalah mursalah* sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abdul Husein. Sehingga setiap sumber dana yang didapat oleh KJKS Manfaat harus disalurkan ke jalan sosial, sesuai dengan tujuan utamanya, yakni membantu orang-orang yang kesulitan dengan prinsip syariah.

Bab Pertama: Pendahuluan Membahas tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Materi ini merupakan pijakan awal sebagai kerangka dasar dalam proses penulisan skripsi ini.

Bab Kedua: Landasan teori tentang Akad *Tabarru'* dan Dana Non Halal dalam Fiqh *Mu'amalah* serta konsep *Maṣlahah Mursalah*

Bab Ketiga: Data Penelitian Pada bagian ini akan diuraikan hasil dari data-data yang didapat dari KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya.

Bab Keempat: Analisis Data Berisi analisa dari penelitian yang terdapat dalam bab III yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat dalam bab II serta interpretasi hasil penelitian.

Bab Kelima: Penutup Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan-pembahasan sebelumnya.

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Darmiati
NIM : C02208106
Jurusan/Fakultas : Syariah/Muamalah
Tempat Tanggal Lahir : Tuban, 19 Desember 1989
No. H.P. : 085730414464
Email : darmiati45@gmail.com
Alamat Asal Lengkap : Dukuh Tanjang RT/RW 004/001 desa Pulogede Kec.
Tambakboyo kab. Tuban

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN : 1996-2002
SMP I Tambakboyo : 2002-2005
MA Assalam : 2005-2008
IAIN Sunan Ampel : 2008-2012

KARYA TULIS

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalokasian Dana Non Halal bagi Kepentingan Umum pada Koperasi Jas Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya”



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Jend. A. Yani 117, Telp. 031-8417198 Fax. 031- 8418457 E-mail: syariah@sunan-ampel.ac.id Tromol Pos 4/ WO Surabaya 60237

SURAT TUGAS


Nomor : In.02/1/PP.00.9/833/ST/1/2012

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya memberikan tugas kepada :

N a m a : Darmiati
Nomor Induk Mahasiswa : C02208106
Semester / Jurusan : VIII / Muamalah
Untuk mengadakan riset di : KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) Manfaat Gayung
Kebonsari Surabaya
Mulai tanggal : 06 Juni 2012 s/d 06 Juni 2012

Demikian harap dilaksanakan dengan baik.

Surabaya, 06 Juni 2012

Dekan.
Dekan I.

D. N. H. Rusruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

dana eksternal meliputi denda, dana non halal misalnya bunga bank dan lain sebagainya.

Infak dan şadaqah merupakan semua jenis infak dan şadaqah baik yang diperuntukkannya ditentukan secara khusus oleh pemberi infak dan şadaqah maupun yang tidak.

Şadaqah hukumnya diperbolehkan selama benda yang dişadaqahkan itu adalah milik sendiri dan benda itu dari segi zatnya suci dan diperbolehkan dengan cara yang benar, meskipun jumlahnya sedikit. Maka jika barang itu statusnya milik bersama atau orang lain, maka tidak sah benda itu untuk dişadaqahkan karena barang yang dişadaqahkan harus didasari oleh keikhlasan dan kerelaan dari pemiliknya.

Şadaqah hendaknya disalurkan tepat sasaran artinya orang yang menerima adalah yang benar-benar berhak dan sangat membutuhkan seperti fakir miskin. Maka orang kaya tidak boleh menerima şadaqah dengan cara memperlihatkan dirinya sebagai orang fakir.

Pada dasarnya şadaqah dapat diberikan kapan saja dan di mana saja tanpa terkait oleh waktu dan tempat. Namun, ada waktu dan tempat tertentu yang lebih diutamakan yaitu lebih dianjurkan pada bulan Ramadhan. Şadaqah sangat dianjurkan ketika sedang menghadapi perkara penting, sakit atau berpergian, berada di kota Makkah dan Madinah, peperangan, haji, dan pada

Umar terhadap rumah Sa'ad, ketika ia lari bersembunyi dari pengawasannya dan juga pembakaran olehnya terhadap rumah-rumah penjual minuman keras, adapun memungut denda uang, tidak satupun dari ulama pengikut Syafi'i yang memperbolehkannya karena memungut denda uang tersebut sama termasuk dengan mengambil harta milik orang lain secara batil.

Dalam literatur lain, disebutkan pendapat yang rajih tentang denda adalah keharamannya. Alasan pertama, meskipun orang yang terlambat membayar hutang harus dihukum, tapi belum pernah ada dalam sejarah islam seorang Qadhi (hakim) yang menjatuhkan hukuman denda, sehingga tambahan apapun dari nominal hutang, maka itu termasuk dari riba yang diharamkan. Alasan kedua, denda karena terlambat membayar hutang mirip dengan riba, maka denda ini dihukumi sama dengan riba sehingga haram diambil. Sesuai dengan kaidah fiqh "*mā qaraba al-syai'a u'thiya hukmuhu*" (apa saja yang mendekati atau mirip dengan sesuatu, dihukumi sama dengan sesuatu tersebut). Sehingga denda karena terlambat membayar hutang atau angsuran utang hukumnya haram karena termasuk riba. Jika denda dihukumi sama dengan riba maka denda merupakan salah satu dana non halal yang juga mengandung unsur riba sebagaimana bunga.¹³

¹³ Denda karena terlambat membayar hutang menurut islam, dalam <http://aryuuki.blogspot.com/2011/01/denda-karena-terlambat-membayar-hutang.html> diakses 13 Juli 2012

turunnya Al-Qur'an, yaitu seseorang berhutang kepada orang lain, kemudian setelah jatuh tempo, debitur mengatakan kepada krediturnya: berikanlah perpanjangan waktu kreditmu kepadaku, maka aku tambahi bunganya, lalu kedua orang itu melakukannya. Inilah yang dinamakan riba berganda-ganda. Kemudian Allah melarang hal semacam ini didalam Islam. Dan biasanya terjadinya riba semacam ini antara si fakir dengan si kaya yang memanfaatkan kesempatan orang dengan tidak memperdulikan sendi-sendi kasih sayang yang menjadi dasar pembangunan masyarakat dalam Islam.

Riba semacam ini oleh rasa kemanusiaan yang luhur tentu tidak dapat dibenarkan. Saya berkeyakinan bahwa debitur yang berada dalam keadaan darurat dan membutuhkan, maka ia terlepas dari dosa dari transaksi semacam ini, karena dia melakukannya secara terpaksa atau dianggap terpaksa orang yang dalam keadaan butuh memperoleh pinjaman dengan bunga diperbolehkan bagi pribadi-pribadi yang mengalami darurat.

Pendapat atau fatwa Syekh Rasyid Ridla, bahwa beliau membenarkan kaum muslimin mengambil hasil bunga dari penduduk negeri kafir. Lebih lanjut beliau berkata: menurut ketentuan asal syariat harta penduduk negeri kafir Harbi boleh diambil oleh pihak yang menguasainya dan mengalahkannya. Riba mengandung kedhaliman, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 279. Sedangkan mendhalimi orang kafir Harbi tidak haram, karena sebagai tindak balasan terhadap kedhalimannya. Sebab

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diklasifikasikan pendapatnya tentang halal-haramnya atau boleh tidaknya riba atau bunga bank, sebagai berikut:

- a. Dalam keadaan-keadaan darurat bunga halal hukumnya. Hanya bunga yang berlipat ganda yang saja yang dilarang, adapun suku bunga yang wajar dan tidak mendhalimi diperkenankan.
- b. Lembaga keuangan bank, demikian juga Lembaga Keuangan Bukan Bank sebagai lembaga hukum tidak termasuk dalam teritorial hukum taklif.
- c. Hanya kredit yang bersifat konsumtif saja yang pengambilan bunganya dilarang, adapun yang produktif dibolehkan.
- d. Bunga diberikan sebagai ganti rugi atas hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pengelolaan dana tersebut.
- e. Uang dapat dianggap sebagai komoditi sebagaimana barang-barang lainnya sehingga dapat disewakan atau diambil upah atas penggunaannya.
- f. Bunga diberikan untuk mengimbangi laju inflasi yang mengakibatkan menyusutnya nilai uang atau daya beli uang.
- g. Jumlah uang pada masa kini mempunyai nilai yang lebih tinggi dari jumlah yang sama pada suatu masa nanti, oleh karena itu bunga diberikan untuk mengimbangi penurunan nilai atau daya beli uang.

- 7) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik
- 8) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada koperasi sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah.
- 9) Kelenturan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ijārah muntahiyah bi al-tamlīk adalah *ijārah* dengan *wa'ad* perpindahan kepemilikan obyek *ijārah* pada saat tertentu. *Wa'ad* adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu.

Pihak yang melakukan *al-ijārah al-muntahiyah bi al-tamlīk* harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijārah* selesai.

Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati diawal akad *ijārah* adalah *wa'ad* yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai.

menjadi anggota koperasi dapat mereferensikan kepada orang lain untuk bergabung dengan KJKS Manfaat.

Sejak awal berdiri yaitu pada tahun 2006 sampai saat ini jumlah nasabah di KJKS Manfaat sudah mencapai kurang lebih 800 nasabah, dengan adanya nasabah yang semakin lama semakin meningkat, maka dana nasabah juga semakin meningkat pula, oleh karena itu KJKS Manfaat bekerja sama dengan bank koresponden, antara lain: bank Muamalat, BCA Syariah, bank Jatim Syariah, Bank Syariah Mandiri, kerja sama tersebut dilakukan dalam bentuk tabungan dan deposito.

KJKS Manfaat juga bekerjasama dengan koperasi atau BMT lainnya. Dari kerjasama dengan bank koresponden dalam bentuk tabungan, KJKS Manfaat memperoleh bagi hasil, sedangkan dalam bentuk deposito pada bank Jatim Syariah dan Bank Syariah Mandiri mendapatkan tambahan aset berupa giro bank. Hal ini karena untuk mempermudah koperasi dalam pengelolaan uang nasabah yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Adapun denda yang telah dipertentangkan hukumnya oleh para ulama pada bab sebelumnya, oleh KJKS Manfaat ini bukan merupakan aset koperasi melainkan dana yang terpisah dari aset koperasi sendiri, sedangkan pengalokasian dana non halal atau denda ini disalurkan untuk kepentingan umum, misalnya pembangunan jalan, pembangunan jamban, pembangunan aliran air dan lain sebagainya.

Dari pemungutan denda yang diperoleh dari kelalaian nasabah dalam pembayarannya yang sedemikian rupa, maka dalam operasionalnya KJKS Manfaat masih mengandung unsur riba, sebagaimana pendapat para ulama' yang menyatakan bahwa denda itu sama dengan riba dan dihukumi haram yang telah dijelaskan pada BAB II salah satunya adalah Yusuf Qarḍawi yang menyatakan bahwa sesuatu yang haram tetap dinilai haram walaupun niat dan tujuannya mulia. Bagaimanapun baiknya rencana, selama hal itu tidak dibenarkan oleh Islam, selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji.

Menurut pandangan Yusuf Qarḍawi, dana yang berasal dari denda, baik dengan alasan untuk efek jera bagi nasabah-nasabah yang lalai dalam pembayaran, serta dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam mensejahterakan. Dengan mengalokasikan dana non halal atau denda untuk kepentingan-kepentingan sosial, oleh karena denda haram, maka beliau mengaramkan secara mutlak.

Selain itu Yusuf Qarḍawi juga berpendapat bahwa siapa yang mengumpulkan dana dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan sebagainya yang dapat dikategorikan haram untuk terlaksananya rencana-rencana yang baik lainnya tidak ada syafa'at baginya, karena haram dalam syariat Islam tidak dapat dipengaruhi oleh tujuan dan niat.

Dari berbagai sanggahan yang dilontarkan oleh Yusuf Qardawi pada bab sebelumnya tentang dana non halal untuk dana sosial haruslah bisa dilihat dari segi rasional dan segi istinbathnya. Bila hanya mempertimbangkan dari segi sumber dananya saja, maka tentunya dana yang didapat dari sumber yang non halal tersebut, tidak akan terpakai dan selalu mengendap di tabungan. Oleh karena itu, dana non halal yang sama dengan denda karena merupakan riba ini harus dimanfaatkan ataupun disalurkan kepada kepentingan sosial.

Bila hanya melihat dari sumbernya saja, dana yang didapat dari denda tersebut akan sia-sia belaka. Sehingga dana non halal haruslah tetap dipakai dengan memakai dasar prinsip *maṣlahah* diatas. Maka, pendapat Yusuf Qardawi bisa dikesampingkan demi kemaslahatan umat, serta dana yang ada bisa dimanfaatkan di jalan sosial.

Selain pendapat-pendapat yang mengharamkan dana non halal atau denda serta pengalokasiannya, terdapat juga pendapat-pendapat yang menghalalkannya diantaranya yang telah tersebut pada bab sebelumnya, dan salah satunya yaitu Muhammad Syafi'i Antonio bahwa pengalokasian dana non halal atau denda untuk kepentingan sosial, salah satu pertimbangan pemanfaatan dana ini adalah kaidah *akhaḍḍu ḍararain* (mengambil maḍarat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika denda tersebut tidak dialokasikan maka dana tersebut akan mengendap pada KJKS Manfaat itu sendiri.

Dengan adanya produk-produk *funding* dan *lending*, KJKS Manfaat berkembang, dengan perkembangannya, maka KJKS bekerjasama dengan bank koresponden, karena koperasi beranggapan bahwa uang nasabah dalam jumlah besar lebih aman bila di investasikan pada bank dan juga merupakan salah satu kiat koperasi dalam rangka mengelola dana masyarakat serta mempermudah koperasi dalam menampung uang nasabah.

Kerjasama yang dilakukan oleh KJKS manfaat dengan bank-bank koresponden merupakan suatu kebijakan untuk mempermudah nasabah yang mentransfer uangnya ke KJKS Manfaat serta sebagai media untuk pembayaran angsuran nasabah yang memiliki dana pada bank-bank lainnya.

Adapun denda yang di ambil dari nasabah oleh KJKS manfaat ini bertujuan agar nasabah itu merasa jera, sehingga dalam pembayarannya lancar tanpa adanya kredit macet. Namun bila dengan adanya denda nasabah masih tetap sulit atau tidak jera maka koperasi harus mengingatkan dengan baik dan mendatangi rumah nasabah yang bersangkutan.

Koperasi Manfaat mengambil suatu kebijakan bahwa pendapatan non halal atau denda ini dialokasikan sebagai sarana untuk kepentingan sosial. Namun pada kenyataannya, denda yang diperoleh KJKS Manfaat disalurkan melalui akad hibah, walaupun hibah hukumnya sunnah, namun sumber dananya berasal dari denda yang sebagian ulama menghukumi sama dengan riba.

Sehingga apa yang terjadi di KJKS Manfaat belum sesuai prinsip syariah yang bebas dari unsur riba.

Istilah dana non halal, dalam diskusi intensif Ikatan Akuntan Indonesia dan MUI pada 10 September 2008 menyatakan bahwa semua sepakat untuk dirubah. Sebab istilah ini dirasa tidak mencerminkan misi syariah. Meskipun istilah dana non halal ini sudah ada sejak lama dan masuk di dalam dunia perbankan. Namun, agar tidak terjadi salah pengertian di dalam lingkup zakat, infak dan *ṣadaqah*, maka istilah dana non halal diganti dengan dana untuk kepentingan umum.

Alasan lain kenapa dirubah menjadi dana untuk kepentingan umum, karena pada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan non halal dalam arti haram dan tidak bisa digunakan). Dana non halal yang dimaksudkan di sini adalah dana yang diperoleh dari denda para nasabah yang lalai dalam pembayarannya, dimana hal ini tidak menjadi suatu kesengajaan untuk disimpan melainkan sebuah fasilitas yang disediakan bagi masyarakat surabaya dan sekitarnya guna kepentingan sosial semata bukan untuk kepentingan koperasi itu sendiri. Serta dapat meyakinkan masyarakat bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah lebih mampu mensejahterakan masyarakat dengan sendi-sendi syari'at Islam. Sehingga, dana yang didapat dari hasil denda-denda nasabah, haruslah dimanfaatkan. Jangan sampai hanya mengendap di tabungan saja.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan adanya deskriptif dan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dari penelitian ini penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. KJKS Manfaat menggunakan dana non halal yang mana bersumber dari denda para nasabah yang lalai dalam pembayarannya. Dari dana tersebut KJKS Manfaat menggunakannya sebagai dana kebajikan yakni penyalurannya dialokasikan kepada kepentingan-kepentingan umum, misalnya untuk pembangunan jalan, pembangunan jamban, pembangunan saluran air dan lain sebagainya, dan hal tersebut dianggap dapat membantu masyarakat sekitar.

Adapun salah satu tujuan KJKS Manfaat mengambil denda dari nasabah ini karena agar nasabah tidak lalai dalam pembayarannya atau tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Serta dengan adanya kebijakan yang dilakukan koperasi ini agar nasabah merasa jera guna menanggulangi kredit macet dan kelancaran dalam suatu pembayaran. Sehingga dana yang didapat dari denda para nasabah yang lalai dalam pembayarannya dapat dimanfaatkan dan hanya mengendap di tabungan saja.

2. Kebijakan yang diambil oleh KJKS Manfaat yaitu untuk kemaslahatan masyarakat dan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang

- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Mahasiswa Hukum Asuransi dan Koperasi di Indonesia*, Surabaya: Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 2011.
- Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2011.
- Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih; Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Wahbah Zuhailly, *al-Wajiz fi Ushul Fiqh*, Damaskus: Dar el-Fikr, 1995.
- Yayasan Malik Fahd, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Madinah, Thiba'at al-Mushaf, 1418 H.
- Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, 1999.
- Abu 'Ukkasyah Aris Munandar, S.S., Denda dalam Kacamata Syariah, dalam <http://ekonomisyariat.com/cakrawala-ekonomi/denda-dalam-kacamata-syariah.html> diakses 13 Juli 2012
- Denda karena terlambat membayar hutang menurut Islam,dalam <http://aryuuki.blogspot.com/2011/01/denda-karena-terlambat-membayar-hutang.html> diakses 13 Juli 2012.